

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kestabilan ekonomi merupakan tolok ukur bagi pertumbuhan ekonomi yang berkembang secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mengganggu keseimbangan tersebut adalah permasalahan inflasi. Perekonomian Indonesia yang selama ini bergantung dengan tata moneter dan perekonomian dunia tidak dapat menghindari dampak dari permasalahan inflasi tersebut. Salah satu langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi adalah pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas inflasi melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan tindakan yang diterapkan dan dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai badan otoritas moneter untuk menjaga dan merawat stabilitas nilai rupiah, termasuk dalam pengendalian jumlah uang yang beredar dan penyesuaian suku bunga.

Inflasi dicerminkan dalam ketidakstabilan harga-harga barang dan jasa. Tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia yaitu kestabilan nilai rupiah. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang cenderung menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus menerus. Menurut Mc Eachern dalam Sholikhin & Cahyono (2016) inflasi adalah kenaikan harga terus menerus dalam rata-rata tingkat harga. Menurut Lenner dalam Fajarwati (2018) menjelaskan inflasi sebagai keadaan

dimana terjadi kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa secara keseluruhan.

Menurut Vernieris dan Sebold dalam Fajarwati (2018) menjelaskan inflasi sebagai kecenderungan yang terus menerus dari harga secara umum untuk meningkat setiap waktu, yang mencakup dalam tiga aspek, yakni: 1) kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang bisa saja tingkat harga yang terjadi atau aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi secara umum tetap menunjukkan kecenderungan meningkat; 2) secara terus-menerus, peningkatan harga tersebut terjadi tidak hanya dalam satu waktu saja melainkan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama; 3) tingkat harga secara umum, tingkat harga barang yang dimaksud tidak hanya tingkat harga pada satu jenis barang saja namun harga barang secara umum dan menyeluruh. inflasi bisa berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian bergantung seberapa parah inflasi tersebut terjadi. Inflasi sendiri cenderung terjadi di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia.

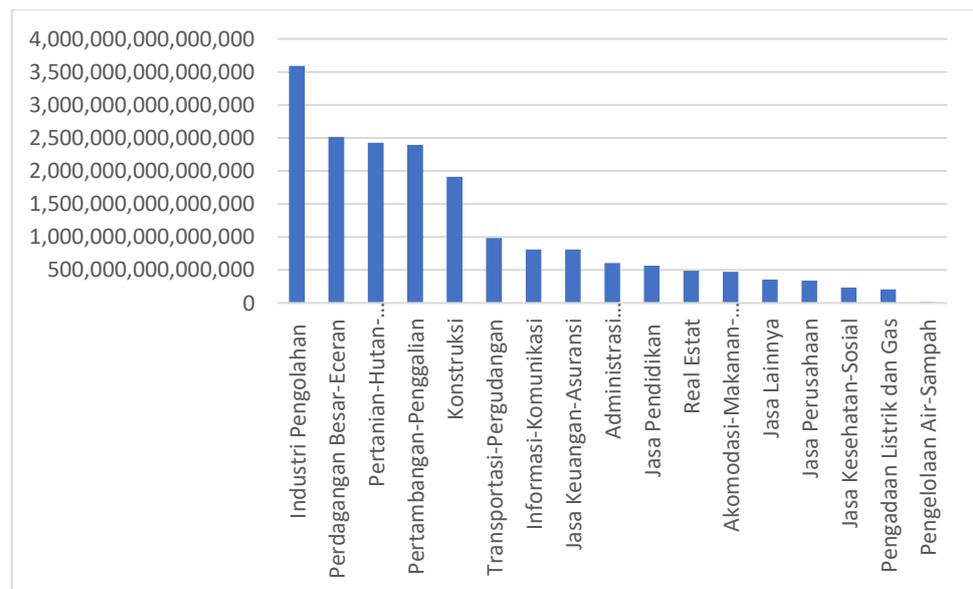
Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Sholikhin & Cahyono (2016) salah satu faktor terjadinya inflasi karena disebabkan oleh pertumbuhan volume jumlah uang beredar yang cepat. Ketika pendapatan masyarakat cenderung meningkat dan diikuti oleh kenaikan permintaan agregat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan output yang diproduksi, maka harga-harga umum akan naik.

Inflasi harus dikendalikan karena inflasi memiliki dampak terhadap perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pengangguran. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, hal ini disebabkan karena naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya pendapatan riil dan daya beli di masyarakat (Fajarwati, 2018).

Untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang di produksi dalam periode waktu tertentu. Nilai PDB akan memberikan suatu gambaran bagaimana kemampuan negara dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Suatu perekonomian dikatakan berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dibandingkan pada masa sebelumnya.

Sektor jasa keuangan dan asuransi merupakan salah satu sektor yang sangat menentukan keberhasilan perekonomian suatu negara. Setiap kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, investasi, dan konsumsi sangat membutuhkan adanya jasa sektor keuangan dan asuransi. Sektor jasa keuangan yang kuat memungkinkan alokasi sumber daya keuangan menjadi lebih efisien (Putra, 2016). Sektor keuangan yang kuat dan modern memberikan sumbangan terhadap stabilitas perekonomian. Pada perekonomian Indonesia sektor jasa keuangan dan asuransi mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan dana pensiuna, jasa keuangan lainnya, serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini

juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. Berikut ini merupakan data PDB Per Sektor tahun 2022 dapat terlihat di gambar 1.1.



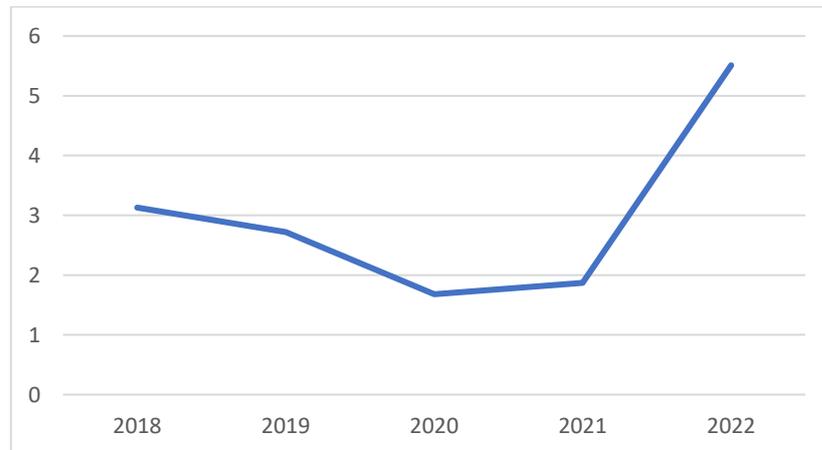
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 PDB Per Sektor di Indonesia (Triliun)

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa dari 17 sektor lapangan usaha yang membentuk struktur dan pertumbuhan pdb. Sektor jasa keuangan masih minim dalam membentuk pertumbuhan domestik bruto Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa sektor lapangan usaha industri pengolahan masih mendominasi disusul dengan sektor perdagangan besar-eceran, pertanian-hutan-perikanan, pertambangan & penggalian, dan konstruksi. Sedangkan sektor jasa keuangan menduduki posisi delapan dalam menyumbang Produk Domestik Bruto.

Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Secara sederhana inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Silitonga, 2021)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu variabel yang mampu menyebabkan terjadinya inflasi. Pendapatan masyarakat dapat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Menurut Krisnaldy dalam Anggraeni & Dwiputri (2022) jika inflasi naik maka pendapatan masyarakat akan turun. Studi oleh Odusanya dan Atanda dalam Anggraeni & Dwiputri (2022) menyimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto memiliki hubungan jangka pendek dan juga jangka panjang dengan inflasi. Sedangkan menurut Hariyanti dan Soekarjo dalam Anggraeni & Dwiputri (2022) menyimpulkan bahwa variabel PDB terhadap inflasi berpengaruh tidak signifikan. Berikut ini merupakan data inflasi di Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat terlihat di gambar 1.2.



Sumber: Bank Indonesia

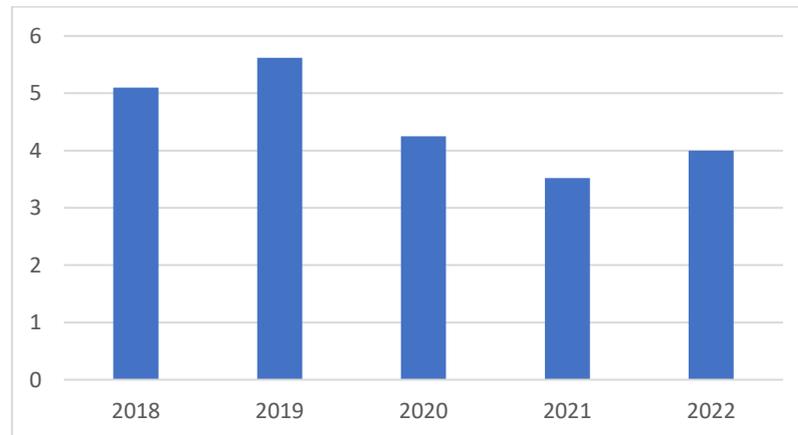
Gambar 1. 2 Tingkat Inflasi di Indonesia (Persen)

Berdasarkan pada gambar 1.2 diatas tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini terjadi dikarenakan adanya tekanan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) maupun dari sisi penawaran (*cost push inflation*). Dalam teori moneter, permintaan disebabkan oleh banyaknya uang beredar di masyarakat, sedangkan jumlah barang dipasaran sedikit. Dari penawaran, inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi. Adanya kenaikan biaya produksi, maka jumlah produk yang dihasilkan sedikit dari yang sebelumnya. Pengurangan jumlah produksi menyebabkan kelangkaan yang mengakibatkan kelangkaan harga. Akan tetapi tingkat inflasi di Indonesia berada di kategori rendah dibawah 10%. Angka tersebut merupakan hal yang lumrah dan justru menunjukkan negara yang sehat, semakin baik kondisi suatu negara penduduknya memiliki daya beli yang besar masih mudah untuk dikendalikan dan belum mengganggu perekonomian suatu negara.

Inflasi mengalami kenaikan dan penurunan dengan tingkat inflasi terbesar

pada tahun 2022 sebesar 5,51%, tingkat penurunan inflasi terendah ada di dua periode yaitu sebesar 1,68% di tahun 2020 dan 187% di tahun 2021. Hal ini dikarenakan dampak dari covid-19 yang terjadi di Indonesia. Ditengah masa pandemi, inflasi di Indonesia relative terkendali. Hasil pengendalian ini tidak terlepas dari koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Variabel makro ekonomi selanjutnya yaitu *BI rate* adalah suku bunga instrument sinyaling Bank Indonesia (BI) merupakan suku bunga kebijakan moneter (*policy rate*) (Indriyani, 2016). Menurut Ambarwati, dkk (2021) suku bunga adalah salah satu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan menambah atau mengurangi jumlah uang dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) akan mempengaruhi tingkat suku bunga antar bank dan tingkat suku bunga deposito yang berakibat pada perubahan suku bunga. Dengan demikian *BI rate* dapat memberi sinyal bahwa pemerintah mengharapkan pihak perbankan dapat menggerakkan sektor rill untuk mendorong laju pertumbuhan Indonesia. Berikut ini merupakan data *BI rate* selama tahun 2018-2022 dapat terlihat di gambar 1.3.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 3 BI Rate di Indonesia (Persen)

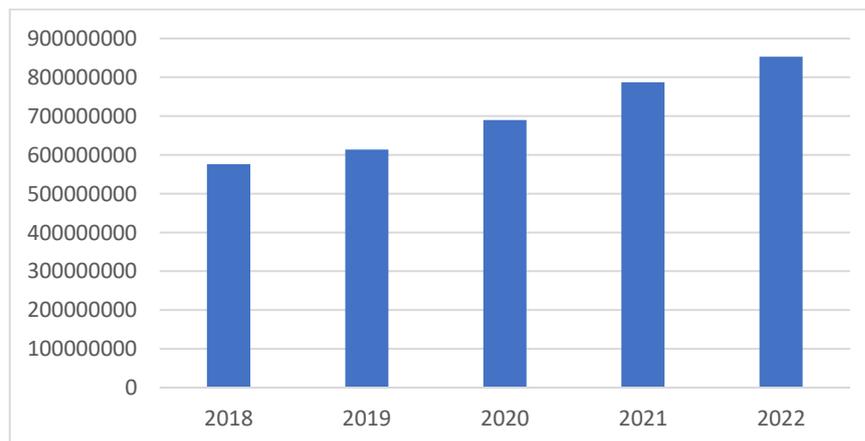
Berdasarkan pada gambar 1.3 diatas, data mengenai BI *rate* mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, nilai BI *rate* tertinggi sebesar 5,62% sedangkan pada tahun 2021 nilai BI *rate* terendah sebesar 3,25%. BI *rate* adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan penentuan nilainya, yaitu inflasi. Selain menjaga stabilitas ekonomi, BI juga memiliki kewenangan atas fluktuasi nilai rupiah.

Kenaikan suku bunga BI dapat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan seiring dengan naiknya suku bunga. Dari sisi lain suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian.

Menurut Putri dan Rosyetti dalam Winarto, dkk (2021) jumlah uang beredar merupakan jumlah seluruh uang dalam perekonomian. Jumlah uang beredar menjadi salah satu instrument yang digunakan Bank Indonesia untuk memacu

kegiatan perekonomian yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Winarto,dkk., 2021). Jumlah uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). Jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) merupakan uang dalam bentuk uang giral dan kartal yang dipegang dan digunakan masyarakat sebagai alat transaksi pembayaran sehari-hari (Mentang,dkk., 2018)

Menurut Warjiyo & Solikin dalam Clansina,dkk (2020), peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kemakmuran masyarakat secara keseluruhan akan mengalami penurunan. Berikut ini merupakan data jumlah uang beredar di Indonesia selama tahun 2018-2022 dapat terlihat di gambar 1.4.



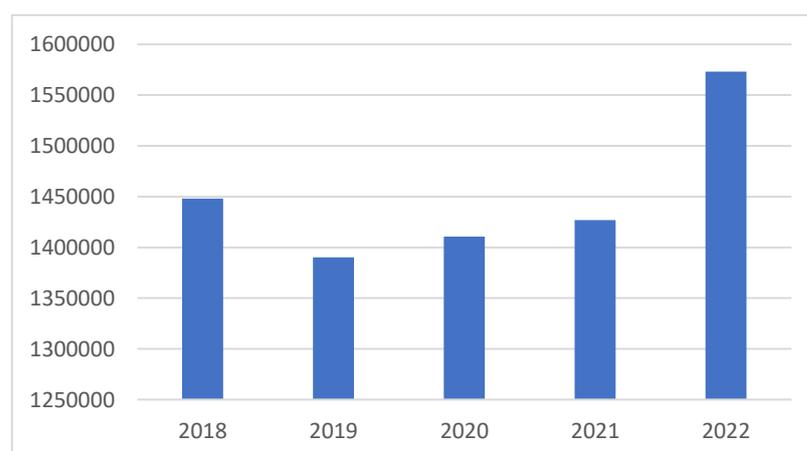
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 4 Jumlah Uang Beredar di Indonesia (Milyar Rupiah)

Berdasarkan pada gambar 1.4 diatas, merupakan jumlah uang beredar di

Indonesia dalam periode 2018-2022. Setiap tahunnya jumlah uang beredar mengalami peningkatan. Hal itu bisa dikatakan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai tukar atau *kurs* adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Pridayanti, 2014). Menurut Batiz dalam Pridayanti (2014) nilai tukar merupakan salah satu variabel yang penting dalam suatu perekonomian terbuka, karena variabel lain seperti harga, tingkat bunga, neraca pembayaran, dan transaksi berjalan. Dalam teori Mundell-Fleming dalam Pridayanti (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara kurs dengan pertumbuhan ekonomi, dimana semakin tinggi kurs maka ekspor neto (selisih antara ekspor dan impor) semakin rendah, penurunan ini akan berdampak pada jumlah output yang semakin berkurang dan akan menyebabkan Produk Domestik Bruto menurun. Berikut ini merupakan data nilai tukar terhadap us dollar di Indonesia selama tahun 2018-2022 dapat terlihat di gambar 1.5.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.5 Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar (Rupiah/USD)

Berdasarkan pada gambar 1.5 diatas, dalam kurun waktu 2018 hingga tahun 2022 data nilai tukar rupiah (kurs) terhadap USD mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Nilai tukar paling rendah berada di tahun 2019 yaitu sebesar Rp13.900, sedangkan nilai tukar tertinggi berada di tahun 2022 yaitu sebesar Rp15.731.

Dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar rupiah ditentukan sepenuhnya oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan kenaikan biaya produksi dalam negeri yang berdampak pada kenaikan harga barang-barang di Indonesia. Ini terjadi karena Indonesia banyak mengimpor bahan baku industri yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah.

Perkembangan data di Indonesia periode tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia kurang stabil yang ditandai dengan tingkat inflasi yang berfluktuasi secara tajam dari tahun ke tahun. Bank Indonesia perlu mempertimbangkan apakah instrument-instrumen moneter yang telah mereka gunakan sudah sesuai atau masih perlu penyesuaian. Dalam penanganan masalah inflasi, kebijakan moneter memiliki peran krusial. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia harus memilih kebijakan moneter yang tepat untuk mengontrol laju inflasi serta meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan, penelitian ini menemukan gap atau masalah dalam inflasi terhadap pdb sektor jasa keuangan, yang mana secara teori apabila inflasi meningkat maka pdb

sektor jasa keuangan akan menurun dan fenomena sektor jasa keuangan masih minim dalam menyumbang Produk Domestik Bruto Indonesia. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh, dengan meningkatnya inflasi tidak diikuti dengan penurunan nilai pdb sektor jasa keuangan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang indikator yang mempengaruhi pdb sektor jasa keuangan dengan menggunakan variabel pendukung diantaranya inflasi, BI rate, jumlah uang beredar, dan nilai tukar. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Bruto Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Di Indonesia Tahun 2006-2022”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1 Bagaimana pengaruh Inflasi, BI *rate*, Jumlah Uang Beredar, dan Nilai Tukar secara parsial terhadap PDB sektor jasa keuangan tahun 2006-2022 ?
- 2 Bagaimana pengaruh Inflasi, BI *rate*, Jumlah Uang Beredar, dan Nilai Tukar secara bersama-sama terhadap PDB sektor jasa keuangan tahun 2006-2022 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

- 1 Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, *BI rate*, Jumlah Uang Beredar, dan Nilai Tukar terhadap PDB sektor jasa keuangan tahun 2006-2022.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, *BI rate*, Jumlah Uang Beredar, dan Nilai Tukar terhadap PDB sektor jasa keuangan tahun 2006-2022 berpengaruh secara bersama-sama.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan terutama pemerintah terkait membuat kebijakan atau pembangunan yang lebih baik di masa depan. Diharapkan dapat pemerintah dapat mengendalikan tingkat inflasi, *BI rate*, jumlah uang beredar, dan nilai tukar di negara Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada civitas akademik mengenai inflasi, *BI rate*, jumlah uang beredar, dan nilai tukar terhadap pdb sektor jasa keuangan di Indonesia tahun 2006-2022. Selain itu, diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan untuk penelitian lebih lanjut tentang subjek yang serupa atau terkait.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data PDB sektor jasa keuangan, inflasi, BI *rate*, jumlah uang beredar, dan nilai tukar melalui *website* resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia.

